



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Menteri Supeno No. 10 Telp. (0271) 714898 Email : dlhsurakarta@gmail.com
SURAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2019 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Substansi pokok LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2019 ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta selama tahun 2019, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta 2016-2021.

Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksinya. Dan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Surakarta, Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA



Ir. GATOR SUTANTO, M.Si

NIP. 19650327 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1. 2. Gambaran Umum Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3. 1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Penempatan dan Status PNS-Non PNS Pegawai DLH Tahun 2019.....	4
Tabel 1. 2. Sarana Prasarana Persampahan DLH tahun 2019	5
Tabel 1. 3. Sarana Prasarana Kebersihan DLH Tahun 2019	6
Tabel 1. 4. Sarana Prasarana Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan DLH	6
Tabel 1. 5. Sarana Prasarana Bidang Tata Lingkungan DLH Tahun 2019.	7
Tabel 1. 6. Sarana Prasarana Bidang Penataan Hukum dan Kapasitas Lingkungan DLH Tahun 2019	7
Tabel 1. 7. Sumber Daya Aset DLH Kota Surakarta Tahun 2019.....	7
Tabel 2 1. Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2019	12
Tabel 2 2. Anggaran Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2019.....	15
Tabel 2 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019.....	16
Tabel 2 4. Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019	17
Tabel 2 5. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
Tabel 3. 1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	29
Tabel 3. 2. Pencapaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2019.....	29
Tabel 3. 3. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	30
Tabel 3. 4. Parameter Perhitungan IKLH	31
Tabel 3. 5. IKLH Tahun 2018 dan Tahun 2019	32
Tabel 3. 6. Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja IKLH	34
Tabel 3. 7. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	37
Tabel 3. 8. Realisasi Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	39
Tabel 3. 9. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	39
Tabel 3. 10. Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah	42
Tabel 3. 11. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	43
Tabel 3. 12. Luasan RTH Publik Kota Surakarta.....	44
Tabel 3. 13. Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja Rasio Luasan RTH Publik.....	47
Tabel 3. 14. Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2019.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta	3
Gambar 2. 1. Sungai Pepe	32
Gambar 2. 2. pembuangan limbah cair pewarna tekstil ke Kali Jenes	33
Gambar 2. 3. Kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan/ ketaatan di bidang hukum lingkungan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	38
Gambar 2. 4. Penyapuan sepanjang Jl. Slamet Riyadi	40
Gambar 2. 5. Kegiatan sosialisasi pembuatan pupuk kompos dari sisa sampah organik di sekolah-sekolah	41
Gambar 2. 6. Taman Manahan	46

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah didasari oleh keinginan mendasar, yaitu membuat masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan tersebut tidak akan dapat diwujudkan tanpa didasari oleh perencanaan komprehensif, tepat waktu dan tepat sasaran. Rangkaian pelaksanaan pembangunan yang diawali sejak perencanaan hingga monitoring dan evaluasi tersebut harus berkualitas dan sejalan dengan garis tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta perlu dilakukan pengukuran ataupun penilaian atas tingkat keberhasilan kinerja. Penilaian dan pengukuran tersebut dapat menjadi panduan bagi instansi dalam memperbaiki ataupun meningkatkan kinerja ke depan. Pengukuran dan penilaian atas kinerja pada instansi pemerintah merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

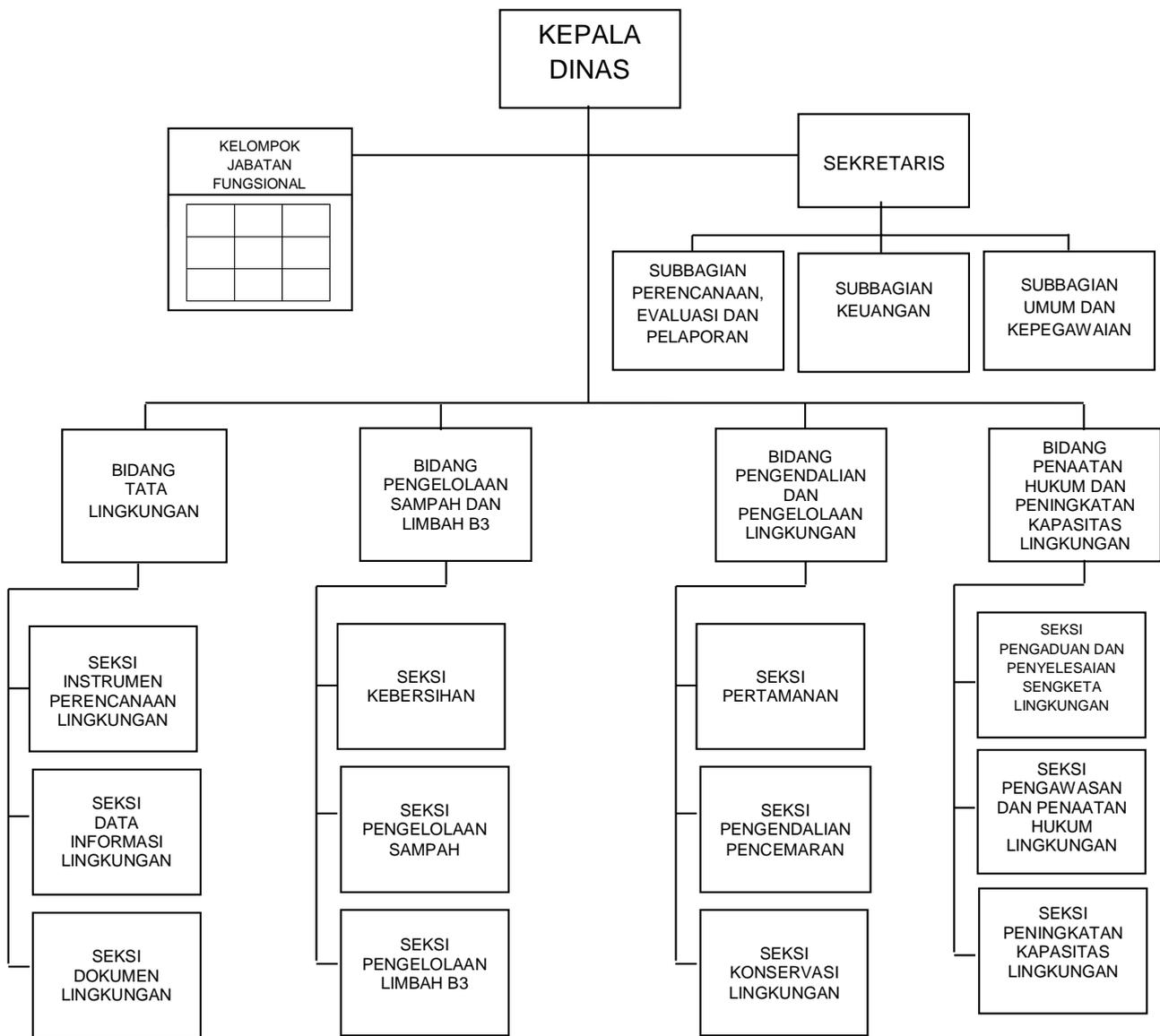
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I. 2. Gambaran Umum Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan penggabungan dua OPD yaitu Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. Dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016, dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi tercantum dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Perangkat Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan peraturan tersebut maka struktur organisasi DLH Kota Surakarta seperti pada Gambar I-1 sebagai berikut :



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

B. Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta didukung oleh sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terdiri atas pegawai negeri sipil, THL, TKPK dan Outsourcing. Sampai dengan Desember 2019, jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Surakarta sebanyak 638 orang yang berada dalam unit kerja: Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1. 1. Penempatan dan Status PNS-Non PNS Pegawai DLH Tahun 2019

No	Penempatan	Status Pegawai				Jumlah
		PNS	THL	Outsourcing	TKPK	
1	Sekretariat	16	5	-	14	35
	- Kepala Dinas	1				
	- Sekretaris	1				
	- Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3			2	
	- Subbagian Keuangan	5			1	
	- Subbagian Umum dan Kepegawaian	6			11	
2	Bidang Tata Lingkungan	8	-	-	1	9
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Instrumen Perencanaan Lingkungan	1	-		-	
	- Seksi Data Informasi Lingkungan	4	-		-	
	- Seksi Dokumen Lingkungan	2	-		-	
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	132	64	161	13	370
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Kebersihan	59	38	137	3	
	- Seksi Pengelolaan Sampah	70	26	24	10	
	- Seksi Pengelolaan Limbah B3	2	-		-	
4	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan	80	5	110	5	200
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Pertamanan	74	5	110	-	
	- Seksi Pengendalian Pencemaran	2	-	-	-	
	- Seksi Konservasi Lingkungan	3	-	-	-	
5	Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	8	-	-	3	11
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	2	-		-	

No	Penempatan	Status Pegawai				Jumlah
		PNS	THL	Outsourcing	TKPK	
	- Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan	3	-		-	
	- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	2	-		-	
6	JFT :	2				2
	- Pengendali Dampak Lingkungan	2				
	Total Jumlah	246	74	271	36	627

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi dan menunjang kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 2. Sarana Prasarana Persampahan DLH tahun 2019

No	Kendaraan/ Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1	Truk sampah (dump truck)	11	4	15
2	Pickup	1		
3	Armroll	3		
4	Toilet Container	6	1	7
5	TPS	4		4
6	TPA	1		
7	Bulldozer	1	2	3
8	Excavator	2	1	3
9	Skitloader	1		
10	Wheelloader	2		
11	Sepeda motor	27		

Tabel 1. 3. Sarana Prasarana Kebersihan DLH Tahun 2019

No	Kendaraan/ Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1	Kijang & Hilux	2		2
2	Pick up (L300)	5		5
3	Armroll	4		4
4	Container Sampah	16	2	18
5	Road Sweeper Kecil	2		2
6	Road Sweeper Besar	2		2
7	Becak Sampah	34	5	39
8	Gergaji Mesin	1		1
9	Mesin Potong Rumput Gendong	2		2
10	Gerobak Motor sampah	5		5
11	Tong Sampah Portable besar	4	2	6
12	Tong Sampah Portable sedang	35		
13	Tong Sampah Portable kecil	13		
14	Sepeda motor	15		15

Tabel 1. 4. Sarana Prasarana Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan DLH

No	Kendaraan/ Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1	Truck tangki penyiraman	4		4
2	Dump truck	5	1	6
3	Sky walker	1		1
4	Motor Roda dua	11		
5	Pick Up	2		2
6	Mesin diesel air	35		35
7	Mesin potong rumput (gendong)	14		14
8	Mesin gergaji chainsaw MS 170 (kecil)	1	1	2
9	Mesin gergaji chainsaw MS 070 (besar)	1	1	2

10	Mesin gergaji chainsaw MS 381 (sedang)	1	2	3
11	Mobil Lab/ Double cabin	1		1
12	IPAL Mobile	1		1

Tabel 1. 5. Sarana Prasarana Bidang Tata Lingkungan DLH Tahun 2019

No	Kendaraan/ Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tdk layak	
1	Kijang station	1		1
2	Motor Roda dua	5		5

Tabel 1. 6. Sarana Prasarana Bidang Penataan Hukum dan Kapasitas Lingkungan DLH Tahun 2019

No	Kendaraan/ Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1	Pick up (L 300)	1		1
2	Motor Roda dua	5		5

Tabel 1. 7. Sumber Daya Aset DLH Kota Surakarta Tahun 2019

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Mobil (Toyota Kijang Inova)	unit	1
2.	KIA Pregio/minibus	unit	1
3.	Daihatsu espass	unit	1
4.	Sepeda motor	unit	15
5.	Rak kayu	unit	2
6.	Rak besi/metal	unit	20
7.	Filling besi/metal	unit	8
8.	Filling kayu	unit	1
9.	Lemari kayu / buffet kayu	unit	20

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
10.	Lemari kaca	unit	13
11.	Brankas	unit	4
12.	Meja rapat	unit	12
13.	Meja komputer	unit	1
14.	Meja biro	unit	96
15.	Meja kerja	unit	25
16.	Kursi kerja	unit	60
17.	Kursi lipat	unit	20
18.	Kursi rapat	unit	142
19.	Kursi tamu	unit	14
20.	Kursi besi/ metal	unit	22
21.	Lambang instansi	unit	5
22.	Papan bagan struktur organisasi	buah	1
23.	White board	unit	5
24.	Korden	buah	3
25.	AC split	unit	24
26.	Mesin absen	unit	3
27.	PC unit	unit	36
28.	Laptop	unit	24
29.	Notebook	unit	1
30.	Printer	unit	29
31.	Mesin ketik manual	unit	9
32.	Peralatan jaringan	unit	1
33.	Proyektor + <i>attachment</i>	unit	3
34.	<i>Wireless amplifier</i>	unit	2
35.	Kamera + <i>attachment</i>	unit	6
36.	Handy Cam	unit	2
37.	Pesawat Telephone	unit	5

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
38.	Telephone (PABX) (Intercom)	unit	12
39.	<i>Handy Talky</i>	unit	11
40.	BOD Meter	unit	1
41.	Colorimeter	unit	1
42.	COD meter	unit	1
43.	Ion Meter	unit	6
44.	Alat Lab. Kualitas air	unit	2
45.	Alat Lab. Kualitas Udara	unit	24
46.	Alat Lab. Lingkungan	unit	1
47.	Oxygen Analyzer	unit	1
48.	Inkubator	unit	1
49.	GPS	unit	1
50.	Transportable Electric Generating Set	unit	2
51.	Stationary Water Pump	unit	2
52.	Pacul	buah	10
53.	Garpu pacul	buah	10
54.	Arit	buah	20
55.	Selang spiral	meter	300
56.	Selang kecil	meter	300
57.	Kran putar	buah	10
58.	Mesin potong rumput	unit	20
59.	Gunting pemangkas	buah	16
60.	Pompa	unit	2

1.2. Fungsi Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta maka Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi strategis yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, yaitu :

1. Penyelenggarakan kesekretariatan dinas;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Penataan Hukum Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan;
4. Pembinaan jabatan fungsional; dan
5. Pengelolaan UPT.

Pada Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

I. 3. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta disusun dengan memperhatikan aspek kajian, capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Surakarta adalah

- Menurunnya kualitas lingkungan binaan yang ditandai dengan menurunnya ekosistem sungai yang melewati Kota Surakarta karena pencemaran air sungai akibat aktivitas industri dan pembuangan sampah sembarangan di sungai;

- Kurang idealnya luas ruang terbuka hijau (RTH) publik sesuai amanat undang-undang sebesar 20%;
- Terbatasnya daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo;
- Pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) masih terbatas;
- Kurang optimalnya penegakan regulasi lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL;
- Keterbatasan industri kecil menengah (IKM) untuk mengolah limbah sesuai standar *waste water treatment*;
- Kurang optimalnya koordinasi antar daerah dalam pencegahan pencemaran air dan pembuangan sampah sembarangan di sungai;
- Kurang optimalnya pengawasan terhadap dokumen lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Walikota Surakarta Tahun 2019, secara lengkap sebagai berikut :

Tabel 2 1. Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan	Persentase kecukupan sarana untuk untuk administrai perkantoran	100%
		Persentase kecukupan sarana aparatur	100%
2.	Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan	Persentase Kecukupan sarana aparatur	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat	Persentase penanganan sampah	97,12%
		Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	2,756
4.	Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Persentase sampah yang dikelola melalui bank sampah	0,69%
		Bank Sampah yang terbentuk	10 kelompok
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota	Pencemaran Status Mutu air	100%
		Cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL)	66,67%
		Indeks Pencemaran air	42,22
		Pencemaran status mutu air	100%
		Indeks Pencemaran Air	42,22
		persentase kualitas udara ambien	100%
6.	Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan berpotensi melakukan	Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	pencemaran lingkungan	Persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan udara	100%
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	100%
		Indeks Pencemaran air	42,22
		Indeks Pencemaran Udara	64,68
		Indeks Tutupan Hutan	23,26
7.	Menyediakan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan	Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Taman Hijau	435.38 Ha
		Indeks Pencemaran Air	42,22
		Indeks Pencemaran Udara	64,68
		Indeks Tutupan Hutan	23,26
		Jumlah sumur resapan dangkal	31 unit
8.	Meningkatkan penerapan kajian dampak lingkungan yang terkait dengan upaya pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup	Indeks pencemaran air	42,22
		Indeks pencemaran udara	64,68
		Indeks Tutupan Hutan	23,26
9.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Sekolah Adiwiyata	23,63%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Meningkatnya lingkungan yang hijau, nyaman dan indah	Luasan Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik dan Taman Hijau	9,89%
		Persentase taman kota dalam kondisi baik	67%
11.	Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan : Renstra dan Renja PD	2 dokumen
12.	Peningkatan kinerja terhadap intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan PAD	5 %

Tabel 2.2. Anggaran Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2019

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.784.100.000	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.436.713.200	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.400.000	
4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.289.857.950	
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	152.700.000	
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	333.540.000	

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	408.000.000	
8.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	51.250.000	
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	383.850.000	
10.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	675.210.000	
11.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	85.000.000	
12.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.739.387.655	
	JUMLAH	25.376.008.805	

Tabel 2 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	41,4
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	66,7%
		Persentase penganganan sampah	97,12%
		Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	9,89%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatkan kalitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	66,4

Tabel 2 4. Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	5.073.220.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.984.933.200	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	86.280.000	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.400.000	
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.385657.950	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	236.325.000	

6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	383.540.000	
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	405.000.000	
8	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	51.250.000	
9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	513.020.000	
10	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	675.210.000	
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	55.000.000	
12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.252.832.655	
	JUMLAH	27.138.668.805	

Tabel 2 5. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sebelum Perubahan					No.	Sesudah Perubahan				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan	Persentase kecukupan sarana untuk untuk administrai perkantoran	100%	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.784.100.000	1.	Meningkatk an kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	41,4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	383.540.000
		Persentase kecukupan sarana aparatur	100%					Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	66,7%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	405.000.000

				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.400.000					Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	51.250.000
2.	Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan	Persentase Kecukupan sarana aparatur	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.436.713.200					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	513.020.000
	Meningkatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat	Persentase penanganan sampah	97,12 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.289.857.950					Program Peningkatan Pengendalian Polusi	675.210.000

		Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	2,756							Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.073.220.000
3.	Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Persentase sampah yang dikelola melalui bank sampah	0,69%							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.984.933.200
		Bank Sampah yang terbentuk	10 klp							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	86.280.000

4.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota	Pencemaran Status Mutu air	100%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	333.540.000					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.400.000
		Cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL)	66,67 %					Persentase penganganan sampah	97,12 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.385657.950
		Indeks Pencemaran air	42,22							Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	236.325.000
		Pencemaran status mutu air	100%					Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	9,89%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.252.832.655

		Indeks Pencemaran Air	42,22			2.	Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	66,4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	55.000.000
		persentase kualitas udara ambien	100%								
5.	Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan berpotensi melakukan pencemaran lingkungan	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100%								

		Persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan udara	100%	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	675.210.000						
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	100%								
		Indeks Pencemaran air	42,22								

		Indeks Pencemaran Udara	64,68								
		Indeks Tutupan Hutan	23,26								
7.	Menyediakan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan	Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Taman Hijau	435.38 Ha	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	408.000.000						
		Indeks Pencemaran Air	42,22								
		Indeks Pencemaran Udara	64,68								
		Indeks Tutupan Hutan	23,26								
		Jumlah sumur resapan dangkal	31 unit								

8.	Meningkatkan penerapan kajian dampak lingkungan yang terkait dengan upaya pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup	Indeks pencemaran air	42,22	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	51.250.000						
		Indeks pencemaran udara	64,68								
		Indeks Tutupan Hutan	23,26								
9.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Sekolah Adiwiyata	23,63 %	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	383.850.000						

10.	Meningkatnya lingkungan yang hijau, nyaman dan indah	Luasan Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik dan Taman Hijau	9,89%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.739.387.655						
		Persentase taman kota dalam kondisi baik	67%								
11.	Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan : Renstra dan Renja PD	2 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	85.000.000						

12.	Peningkatan kinerja terhadap intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan PAD	5 %	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	152.700.000						
				JUMLAH	25.376.008.805						27.138.668.805

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 85%	Sangat Baik
2.	70– 85%	Baik
3.	55– 70 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2019 dan Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021, hasil pengukuran kinerja tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Pencapaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019			% Capaian 2018	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	41,37	52,67	127,31	115,34%	126,28
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).	66,67 %	65,52%	98,28	102,92	84,25

	Persentase penanganan sampah	97,12%	88,88%	91,52	100,80	91,33
	Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	9,89%	8,47%	85,64	98,88	84,7
RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN KINERJA 2019				101,30		

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan, secara umum kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dikategorikan **sangat baik**.

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3. 3. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			Realisasi tahun 2018	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	41,37	52,67	127,31	47,53	128,28

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dengan rincian dan rumus sebagai berikut :

Rumus Perhitungan IKLH :

$$\text{IKLH Kab/Kota} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

Tabel 3. 4. Parameter Perhitungan IKLH

No.		Parameter		Bobot
		IKLH 2018	IKLH Lama	
1.	Kualitas Air Sungai	TSS	TSS	30%
		DO	DO	
		BOD	BOD	
		COD	COD	
		Total Fosfat	Total Fosfat	
		Fecal Coliform	Fecal Coliform	
		pH	Total Coliform	
		NH3-N	-	
		NO3-N	-	
		TDS	-	
2.	Kualitas Udara	SO2	SO2	30%
		NO2	NO2	
3.	Kualitas Tutupan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luas Tutupan Hutan, belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung (sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25%) ■ Ruang Terbuka Hijau, Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luas Tutupan Lahan ■ Dinamika Vegetasi 40% 	40%

Pencapaian indikator kinerja IKLH Tahun 2019 sebesar 52,67 dilakukan melalui kegiatan diantaranya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, peningkatan operasi persampahan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasana persampahan dan kebersihan, penataan taman, peningkatan fungsi taman dan jalur hijau, pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, koordinasi pengelolaan prokasih/ superkasih pemantauan kualitas lingkungan, dan sarana prasarana pengendalian pencemaran.



Gambar 2. 1. Sungai Pepe

Berdasarkan rumus tersebut didapatkan Nilai IKLH Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 3. 5. IKLH Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Tahun	Luas wilayah (km ²)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualits Tutupan Lahan (IKTL)	IKLH
1.	2019	4.404,04	83,30	55,40	27,65	52,67
2.	2018	4.404,04	84,78	36,67	27,74	47,53
Perubahan			-1,48	18,73	-0,09	5,14

Pada Tabel 3.5. terlihat IKLH Kota Surakarta pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan sebesar 5,14 dibandingkan IKLH Kota tahun 2018. Nilai ideal dari IKLH adalah 100, sehingga semakin rendah nilai IKLH maka dibutuhkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin besar. Nilai IKU kota tahun 2019 turun dibandingkan nilai IKU tahun 2018 yaitu dari 84,78 menjadi 83,3. Nilai IKA Kota mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 18.73 pada tahun 2019 dari 36,67 menjadi 55,40. Sedangkan nilai IKTL kota mengalami penurunan sebesar 0,09 pada tahun 2019. Peningkatan nilai IKLH

kota terjadi karena kontribusi besar dari IKA dengan persentase kenaikan 60,27% dari IKA tahun 2018. Sedangkan nilai IKU dan IKTL mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Nilai IKA mengalami kenaikan disebabkan penambahan parameter Amonia ($\text{NH}_3\text{-N}$) dan Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$) sehingga hasil perhitungan menjadi lebih bagus. $\text{NH}_3\text{-N}$ dan $\text{NO}_3\text{-N}$ merupakan parameter kunci dalam pemantauan lingkungan faktor pertanian dan peternakan. Dimana kedua faktor tersebut tidak memberikan kontribusi besar pada pencemaran air di Surakarta. Sehingga menyebabkan nilai IKA mengalami perbaikan.



Gambar 2. 2. pembuangan limbah cair pewarna tekstil ke Kali Jenes

Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Surakarta dihitung berdasarkan hasil pemantauan udara ambien di wilayah pemukiman, kawasan industri, perkantoran/ komersial dan jalan raya. Pemantauan dilakukan dengan metode passive sampler dengan menggunakan parameter SO_2 dan NO_2 . Parameter SO_2 merupakan parameter kunci untuk memantau kondisi pencemaran udara dari sumber industri dan NO_2 untuk sektor transportasi. Penurunan nilai IKU dapat disebabkan karena jumlah kendaraan yang semakin tinggi. Menurunnya nilai IKU menunjukkan tingkat pencemaran udara di Kota Surakarta meningkat. Peningkatan Pencemaran udara dapat dikarenakan peningkatan volume kendaraan dan kegiatan industri/ usaha di Kota Surakarta. Masalah pencemaran di Kota Surakarta secara umum dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Surakarta, maka kebutuhan akan alat transportasi pun akan semakin meningkat.

Selain meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di kota Surakarta, terdapat juga kendaraan dari luar Kota Surakarta yang masuk yang jumlahnya tidak dapat ditentukan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan mengakibatkan peningkatan konsumsi BBM. Peningkatan penggunaan bahan bakar ini akan meningkatkan emisi gas polutan udara sehingga akan menurunkan kualitas udara ambien kota Surakarta. Selain itu, menurunnya jumlah dan kualitas tutupan lahan (RTH) juga mengurangi kemampuan dalam mengurangi pencemaran udara.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks Tutupan Hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Nilai IKTL Kota Surakarta tahun 2019 ini termasuk kategori rendah. Prosentasi luasan RTH publik Kota Surakarta berdasarkan hasil kajian RTH publik sebesar 8,47 belum memenuhi kondisi ideal sebesar 20%. Berdasarkan tabel 3.5 strategi peningkatan IKLH Kota pada tahun mendatang berfokus pada perbaikan kualitas tutupan lahan dan perbaikan kualitas udara.

Dalam mencapai capaian kinerja indikator IKLH tidak terlepas dari manfaat yang diterima dari beberapa kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2019 pagu anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya indikator IKLH adalah sebesar Rp 14.626.510.605,- realisasinya sebesar 14.473.395.483 atau capaian sebesar 98,95%. Rincian program dan kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 3. 6. Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja IKLH

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		6.385.657.950	6.308.784.998	98,80
	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	250.000.000	230.618.750	92,25
	Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	1.056.967.950	1.017.049.348	96,22
	Kerjasama Pengelolaan Persampahan	62.890.000	61.036.000	97,05

	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	5.015.800.000	5.000.080.900	99,69
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		343.540.000	336.199.000	97,86
	Koordinasi penilaian Kota Sehat/ Adipura	90.000.000	87.046.500	96,72
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	70.250.000	69.064.000	98,31
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	45.000.000	44.656.500	99,24
	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih	56.240.000	55.223.000	98,19
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH	82.050.000	80.209.000	97,76
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		405.000.000	401.450.600	99,12
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Sumber-Sumber Air	200.000.000	197.622.000	98,81
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	182.000.000	181.245.600	99,59
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	23.000.000	22.583.000	98,19
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		51.250.000	44.874.150	87,56
	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	26.250.000,00	24.912.500	94,90
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	25.000.000	19.961.650	79,85
Program Peningkatan Kualitas dan Akses		513.020.000	499.643.500	97,39
	Peningkatan edukasi dan komunikasi	310.000.000,00	304.735.000	98,30

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	masyarakat di bidang lingkungan			
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	59.500.000,00	57.332.500	96,36
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	143.520.000,00	137.576.000	95,86
Program Peningkatan Pengendalian Polusi		675.210.000	665.817.500	98,61
	Pengujian emisi kendaraan bermotor	140.910.000	137.937.500	97,89
	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	534.300.000	527.880.000	98,80
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		6.252.832.655	6.216.625.735	99,42
	Penataan RTH	2.382.789.000	2.358.622.635	98,99
	Pemeliharaan RTH	3.870.043.655	3.858.003.100	99,69

Permasalahan lingkungan yang berhubungan dengan capaian kinerja IKLH antara lain :

- Kota Surakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi banyak memiliki sentra IKM Batik, pembuatan tempe/ tahu dan kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah cair, dimana IKM memiliki keterbatasan dalam pengelolaan air limbah, mulai dari SDM, finansial dan kelembagaan;
- Kota Surakarta merupakan kota yang berada di hilir sub DAS Bengawan Solo, sehingga kondisi air sungai sangat dipengaruhi oleh pencemaran air sungai di bagian hulu;
- Masih kurangnya komitmen dan kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan/ sungai, dengan masih dijumpainya sampah di sungai yang menyebabkan meningkatnya pencemaran air sungai;
- Peningkatan pencemaran udara disebabkan oleh meningkatnya polusi udara dari sektor transportasi dan kegiatan usaha/ industri
- Masih belum optimalnya RTH di Kota Surakarta yang berfungsi untuk mengurangi polutan di udara.

Strategi yang perlu dilakukan kedepan untuk meningkatkan nilai IKLH antara lain :

- Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk peduli terhadap lingkungan sekitar;
- Perlu dilakukan pembaharuan informasi sumber pencemar melalui inventarisasi sumber-sumber pencemar;
- Penambahan IPAL komunal serta SDM yang memadai bagi industri kecil dan menengah agar limbah yang terbuang ke sungai telah melalui pengolahan sehingga tidak mencemari lingkungan;
- Pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/ industri;
- Peningkatan fungsi utama ruang terbuka hijau yaitu fungsi ekologis dimana fungsi itu berkaitan dengan sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro, dan penyerap polutan.

1.2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).

Tabel 3. 7. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			Realisasi tahun 2018	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).	66,67 %	65,52%	98,28	62,9%	84,25

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan merupakan perbandingan antara pengawasan terhadap pelaku usaha terkait pelaksanaan dokumen lingkungan dengan pelaku usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini bertujuan untuk melakukan kegiatan pengawasan dan kepatuhan hukum terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 belum mencapai target. Target yang ditetapkan sebesar 66,67% terealisasi sebesar 65,52% dengan persentase capaian 98,28%. Capaian kinerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 62,9%.

Aktivitas yang dikerjakan dalam mencapai indikator kinerja ini antara lain pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pemantauan pelaku usaha yang memiliki ijin pembuangan air limbah (IPLC).



Gambar 2. 3. Kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan/ ketaatan di bidang hukum lingkungan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan utama dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang mendukung indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan adalah kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan pengelolaan B3 dan limbah B3. Pada kegiatan ini telah dilaksanakan pengawasan terhadap usaha/ kegiatan sejumlah 22 perusahaan. Sedangkan usaha/ kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sebanyak 90 usaha terawasi.

Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan Rp. 84.656.500,- . Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3. 8. Realisasi Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		85.000.000	84.656.500	99,60
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH	40.000.000	40.000.000	100,00
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	45.000.000	44.656.500	99,24

1.3. Persentase penanganan sampah

Tabel 3. 9. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			Realisasi tahun 2018	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase penanganan sampah	97,12%	88,88%	91,52	97,78 %	91,33

Persentase penanganan sampah merupakan perbandingan antara jumlah sampah yang tertangani dengan produksi sampah di Kota Surakarta. Jumlah sampah yang tertangani di Kota Surakarta sebanyak 110.893.880 kg/ tahun. Sampah yang tertangani berasal dari sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, pelaku usaha, pasar, sampah di jalan-jalan dan taman, serta sampah yang dihasilkan dari event-event di Kota Surakarta. Produksi sampah di Kota Surakarta sebesar 124.766.709 kg/ tahun dihasilkan dari perhitungan sebagai berikut :

$\text{Produksi sampah} = \text{jumlah penduduk kota} \times \text{sampah yang dihasilkan per orang} \times 365 \text{ hari}$



Gambar 2. 4. Penyapuan sepanjang Jl. Slamet Riyadi

Sampah yang dihasilkan setiap orang per hari adalah 600 gram, dengan jumlah penduduk kota surakarta 569.711 penduduk. Sehingga didapatkan persentase penanganan sampah sebesar 88,88%. Capaian kinerja indikator persentase penanganan sampah belum memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan perbedaan perhitungan pada komponen sampah yang dihasilkan setiap orang per hari. Sebelum tahun 2019 perhitungan sampah yang dihasilkan setiap orang per hari di kota besar berdasarkan SNI 19-3964-1994 adalah 500 gram. Namun berdasarkan hasil Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Surakarta (Jakstrada) Tahun 2019 produksi sampah setiap orang per hari di Kota Surakarta adalah 600 gram.

Meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap orang per hari disebabkan perkembangan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Perbedaan perhitungan tersebut menyebabkan perhitungan persentase pengelolaan persampahan menurun. Penanganan sampah di Kota Surakarta dibagi pada tiga sektor dengan penanggungjawab yang berbeda. Penanganan sampah rumah tangga di wilayah merupakan kewenangan dari kelurahan masing-masing, sampah yang dihasilkan dari pasar merupakan kewenangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menangani sampah hasil dari penyapuan jalan, sampah yang dihasilkan di taman, hasil perempelan/ penebangan pohon dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS).

Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan peningkatan pengelolaan sampah seperti penanganan sampah dengan meningkatkan sarana prasarana penanganan sampah. Dan pengurangan produksi sampah melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) seperti bank sampah, dan pada tahun 2019 telah ditandatangani kesepakatan pembangunan PLTSA di TPA Putri Cempo. Dengan pembangunan sarana prasarana PLTSA maka akan mengurangi penumpukan sampah di TPA dan dapat menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi penduduk disekitar TPA.



Gambar 2. 5. Kegiatan sosialisasi pembuatan pupuk kompos dari sisa sampah organik di sekolah-sekolah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Surakarta antara lain :

1. Pertambahan penduduk meningkatkan volume, jenis dan karakteristik sampah menyebabkan peningkatan produksi sampah;
2. Perubahan pola konsumsi menyebabkan penggunaan kemasan plastik, styrofoam, dan kotak nasi, serta penggunaan kantong kresek meningkat;
3. Paradigma dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah disembarang tempat serta belum terciptanya budaya memilah sampah;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sampah, SDM dan anggaran pengelolaan sampah;

Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator persentase penanganan sampah antara lain :

1. Membuat kebijakan ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengganti ke bahan yang ramah lingkungan;
2. Perlu dilakukan pemutakhiran data dan informasi terkait produksi sampah di Kota Surakarta;
3. Perlu dilakukan koordinasi yang intens bagi tiga sektor penanggungjawab sampah di Kota Surakarta sehingga penanganan sampah di masing-masing sektor optimal;

Pada tahun 2019 anggaran untuk pengelolaan sampah di Kota Surakarta mencapai Rp **13.823.966.150,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **13.295.406.939,-** atau realisasi sebesar 96,18%. Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja persentase penanganan sampah antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. 10. Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		6.984.933.200	6.539.897.141	93,63
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.905.780.000	1.795.185.000	94,20
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	387.680.000	377.610.800	97,40
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.001.599.200	3.886.031.330	97,11
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK Penugasan)	689.874.000	481.070.011	69,73
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		6.385.657.950	6.308.784.998	98,80
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	250.000.000	230.618.750	92,25
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.056.967.950	1.017.049.348	96,22
	Kerjasama pengelolaan sampah	62.890.000	61.036.000	97,05

	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan	5.015.800.000	5.000.080.900	99,69
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		217.050.000	211.912.000	97,63
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	45.000.000	44.656.500	99,24
	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	90.000.000	87.046.500	96,72
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	82.050.000	80.209.000	97,76
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		236.325.000	234.812.800	99,36
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	236.325.000	234.812.800	99,36

1.4. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Tabel 3. 11. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Realisasi tahun 2018	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	9,89%	8,47%	85,6	9,72%	84,7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dan ruang terbuka privat 10% dari luas kota. Dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota Surakarta juga telah ditetapkan pengalokasian RTH sebesar 30%. Proposal 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi, iklim, maupun sistem ekologis lain yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Berdasarkan hasil pemetaan RTH tahun 2019 luas RTH publik di Kota Surakarta adalah 372,97 Ha atau 8,47 % dari luasan Kota Surakarta. Pada tahun 2019 capaian kinerja rasio RTH Publik tidak dapat memenuhi target dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun luasan RTH publik pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3. 12. Luasan RTH Publik Kota Surakarta

No	Jenis RTH	Luas RTH (Ha)
A	RTH TAMAN DAN HUTAN KOTA	
1	Taman RT	0,34
2	Taman RW	1,74
3	Taman Kelurahan	2,06
4	Taman Kecamatan	26,28
5	Taman Kota	53,76
6	Hutan Kota	103,39
7	Sabuk Hijau	0,002
B	RTH JALUR HIJAU JALAN	
1	Pulau dan Median Jalan	6,14
2	Jalur Pejalan Kaki	14,94
C	RTH FUNGSI TERTENTU	
1	Sempadan Sungai	69,81
2	Sempadan Rel	23,28
3	Pengaman Sumber Mata Air	1,6
4	Pemukaman	69,64
	TOTAL	372,97

Pada tahun 2015 telah dilakukan perhitungan RTH publik dengan total luas RTH Publik seluas 427,88 Ha dengan persentase 9,72%. Penurunan luas RTH pada pemetaan tahun 2019 diantaranya disebabkan oleh

1. Perbedaan metode pengukuran pada sempadan sungai. Pada tahun 2015 sempadan sungai diukur sepanjang 100 meter dari kanan kiri sungai. Sedangkan pada tahun 2019 berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031 Kota Surakarta Pasal 36 Ayat 1 Sungai Bengawan Solo yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul. Dan Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajahputih, Kali Pepe, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem

Wulung yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

2. Perbedaan pengklasifikasian kepemilikan RTH antara tahun 2015 dan 2019. Pada tahun 2015 RTH jenis perkantoran/ kantor pemerintah, rumah sakit, puskesmas, dan sekolah termasuk RTH publik. Sedangkan pada perhitungan tahun 2019 berdasarkan Permen Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/ 2008 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
3. Berkurangnya luasan RTH karena aktivitas pembangunan kota untuk fasilitas umum.

Upaya yang telah dilakukan untuk indikator kinerja Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik adalah melakukan pemetaan untuk pemutakhiran luasan eksisting RTH publik Kota Surakarta dari perhitungan yang dilakukan pada tahun 2015. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya melaksanakan penataan dan pemeliharaan taman dan jalur hijau serta membuat resapan air untuk meningkatkan fungsi RTH untuk ketersediaan udara bersih dan menjaga keseimbangan sistem hidrologi.

Kegiatan penataan dan pemeliharaan taman serta jalur hijau bertujuan untuk meningkatkan fungsi RTH sebagai sosial budaya dengan penambahan fasilitas untuk kegiatan bersosialisasi, olah raga, dan taman bermain anak. Selain itu untuk meningkatkan fungsi RTH secara ekologi aktivitas yang dilakukan adalah peremajaan tanaman, penyiraman, pemupukan, dan pendangiran. Resapan air yang dimaksud antara lain pembuatan sumur resapan dangkal dan biopori. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pembuatan sumur resapan dangkal di 31 lokasi. Dinas Lingkungan Hidup juga mengadakan alat biopori sebanyak 170 unit, dengan kemampuan pembuatan biopori sebanyak 20 lubang/ unit/ hari.



Gambar 2. 6. Taman Manahan

Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan rasio luasan RTH publik antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting, optimalisasi fungsi ekologis RTH eksisting diantaranya melalui revitalisasi kawasan danau, waduk dan meningkatkan jumlah resapan air seperti biopori, sumur resapan dangkal, serta sumur resapan dalam.
- b. Menerapkan konsep *green building*, keterbatasan lahan untuk mengembangkan kawasan hijau dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun (gedung/ bangunan) melalui tanaman pada atap ataupun tembok bangunan.
- c. Menyusun kebijakan kota hijau, pemerintah daerah serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan Rencana Induk RTH dan penyediaan anggaran untuk peningkatan fungsi dan luasan RTH.
- d. Mengakusisi RTH privat dengan menjadikan bagian RTH publik, akusisi dilakukan dengan menerapkan angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan/ gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan pada lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta pada pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tabel 3. 13. Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja Rasio Luasan RTH Publik

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		6.252.832.655,00	6.216.625.735,00	99,42
	Penataan RTH	2.382.789.000,00	2.358.622.635,00	98,99
	Pemeliharaan RTH	3.870.043.655,00	3.858.003.100,00	99,69
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		405.000.000	401.450.600	99,12
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Sumber-Sumber Air	200.000.000	197.622.000,00	98,81
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	182.000.000	181.245.600,00	99,59
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	23.000.000	22.583.000,00	98,19

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta didukung 13 Program dan 43 Kegiatan dengan anggaran belanja sebesar **Rp 27.138.668.805,00**. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp **26.408.153.284,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 14. Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2019

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% realisasi	% Efisiensi
TOTAL	27.138.668.805	26.408.153.284	97,31	2,69
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.073.220.000	4.946.523.480	97,50	2,50
Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	4.454.000	89,08	10,92
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	235.000.000	186.814.509	79,50	20,50
Penyediaan jasa kebersihan kantor	48.000.000	38.545.050	80,30	19,70
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	55.000.000	53.845.354	97,90	2,10

Penyediaan alat tulis kantor	93.500.000	93.451.300	99,95	0,05
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95.490.000	94.618.054	99,09	0,91
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.000.000	32.030.150	91,51	8,49
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	165.000.000	159.410.000	96,61	3,39
Penyediaan makanan dan minuman	462.000.000	461.957.300	99,99	0,01
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	505.000.000	504.815.663	99,96	0,04
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Honorer/THL	2.384.110.000	2.351.856.500	98,65	1,35
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	990.120.000	964.725.600	97,44	2,56
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.984.933.200	6.539.897.141	93,63	6,37
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.905.780.000	1.795.185.000	94,20	5,80
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	387.680.000	377.610.800	97,40	2,60
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.001.599.200	3.886.031.330	97,11	2,89
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK Penugasan)	689.874.000	481.070.011	69,73	30,27
Program peningkatan disiplin aparatur	86.280.000	85.179.680	98,72	1,28
Pengadaan pakaian kerja lapangan	86.280.000	85.179.680	98,72	1,28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36.400.000	36.168.700	99,36	0,64
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	36.400.000	36.168.700	99,36	0,64
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.385.657.950	6.308.784.998	98,80	1,20
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	250.000.000	230.618.750	92,25	7,75
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.056.967.950	1.017.049.348	96,22	3,78

Kerjasama pengelolaan sampah	62.890.000	61.036.000	97,05	2,95
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan	5.015.800.000	5.000.080.900	99,69	0,31
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	383.540.000	376.199.000	98,09	1,91
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	45.000.000	44.656.500	99,24	0,76
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	56.240.000	55.223.000	98,19	1,81
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	82.050.000	80.209.000	97,76	2,24
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	90.000.000	87.046.500	96,72	3,28
Pemantauan Kualitas Lingkungan	70.250.000	69.064.000	98,31	1,69
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	40.000.000	40.000.000	100,00	0,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	405.000.000	401.450.600	99,12	0,88
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	200.000.000	197.622.000	98,81	1,19
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	182.000.000	181.245.600	99,59	0,41
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	23.000.000	22.583.000	98,19	1,81
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	51.250.000	44.874.150	87,56	12,44
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	26.250.000	24.912.500	94,90	5,10
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	25.000.000	19.961.650	79,85	20,15
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	513.020.000	499.643.500	97,39	2,61

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	310.000.000	304.735.000	98,30	1,70
Pengembangan data dan informasi lingkungan	59.500.000	57.332.500	96,36	3,64
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	143.520.000	137.576.000	95,86	4,14
Program peningkatan pengendalian polusi	675.210.000	665.817.500	98,61	1,39
Pengujian emisi kendaraan bermotor	140.910.000	137.937.500	97,89	2,11
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	534.300.000	527.880.000	98,80	1,20
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	6.252.832.655	6.216.625.735	99,42	0,58
Penataan RTH	2.382.789.000	2.358.622.635	98,99	1,01
Pemeliharaan RTH	3.870.043.655	3.858.003.100	99,69	0,31
Program perencanaan pembangunan daerah	55.000.000	52.176.000	94,87	5,13
Penyelenggaraan musrenbang RKP	10.000.000	7.330.000	73,30	26,70
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	45.000.000	44.846.000	99,66	0,34
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	236.325.000	234.812.800	99,36	0,64
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	236.325.000	234.812.800	99,36	0,64

Penyerapan anggaran tahun 2019 mengalami **peningkatan** dibandingkan daripada serapan anggaran tahun 2018, yaitu pada tahun 2019 sebesar **97,31%** sedangkan tahun 2018 94,28%. Hal ini dapat disimpulkan terdapat efisiensi dana sebesar 2,69% dari pagu anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta ini menyajikan capaian sasaran strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Kesimpulan terhadap hasil kinerja tersebut didukung oleh data-data sebagai berikut:

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis tercapai dengan rincian sebagai berikut :
 1. Indikator kinerja indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) persentase capain kinerja 129,93% kategori **sangat baik**;
 2. Indikator kinerja Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) persentase capaian kinerja 98,28% kategori **sangat baik**;
 3. Indikator kinerja persentase penanganan sampah persentase capaian kinerja 91,52% kategori **sangat baik**;
 4. Indikator rasio ruang terbuka hijau publik persentase capaian kinerja 85,64% kategori **sangat baik**.
- b. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2019 sebesar **Rp 27.138.668.805,00** dengan realisasi sebesar **Rp 26.408.153.284,00** atau dengan serapan dana mencapai 97,31%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Surakarta diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2029 kepada pihak-pihak terkait.

Surakarta, Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA


DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Ir. GATOT SUTANTO, M.Si
NIP. 19650321199203 1 006

LAMP IRAN

PERHITUNGAN NILAI INDEKS KUALITAS AIR (IKA) KOTA SURAKARTA
TAHUN 2019

No.	Nama Ruas Sungai (Lokasi Titik Pantau)	Freq	Indeks Pencemar		IKA -existing		IKA - NSF	
			Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	S. Premulung JEMB. KLECO	1	4.671	Ringan	4.967	Ringan	64.774	SEDANG
		2	3.244	Ringan	3.435	Ringan	68.227	SEDANG
2	S. Premulung JEMB. JONGKE	1	4.652	Ringan	4.911	Ringan	61.693	SEDANG
		2	4.024	Ringan	4.396	Ringan	56.249	SEDANG
3	S. Premulung JEMB. JL. VETERAN	1	4.610	Ringan	4.802	Ringan	60.227	SEDANG
		2	9.817	Sedang	10.294	Berat	45.428	MARGINAL
4	S. Premulung SEMANGGI	1	4.791	Ringan	5.007	Sedang	59.452	SEDANG
		2	9.445	Sedang	10.020	Berat	49.612	MARGINAL
5	S. Gajah Putih JEMB. JL. PAKEL	1	4.567	Ringan	4.869	Ringan	59.109	SEDANG
		2	5.654	Sedang	6.052	Sedang	52.338	SEDANG
6	S. Gajah Putih JEMB. JL. LETJEN. SUPRAPTO	1	5.001	Sedang	4.864	Ringan	62.596	SEDANG
		2	9.885	Sedang	10.360	Berat	47.525	MARGINAL
7	S. Gajah Putih JL. AHMAD YANI	1	4.794	Ringan	4.990	Ringan	61.631	SEDANG
		2	2.718	Ringan	3.072	Ringan	53.738	SEDANG
8	S. JENES. JNS. Hulu	1	5.393	Sedang	6.011	Sedang	43.840	MARGINAL
		2	14.586	Berat	15.222	Berat	39.201	MARGINAL
9	S. JENES. JNS. Tengah	1	5.359	Sedang	5.892	Sedang	45.089	MARGINAL
		2	12.058	Berat	12.876	Berat	37.208	MARGINAL
10	S. JENES. KEL. SANGKRAH	1	5.407	Sedang	5.983	Sedang	44.265	MARGINAL
		2	12.076	Berat	12.890	Berat	38.047	MARGINAL
11	S. ANYAR HULU (PINTU AIR TIRTONADI)	1	2.418	Ringan	2.414	Ringan	70.374	CUKUP BAIK
		2	3.258	Ringan	3.381	Ringan	61.890	SEDANG
12	S. ANYAR JEMB. JL. KATAMSO	1	3.894	Ringan	3.992	Ringan	65.354	SEDANG
		2	7.581	Sedang	7.822	Sedang	61.388	SEDANG
13	S. ANYAR HULU (TEMP. GULON)	1	3.311	Ringan	3.383	Ringan	67.897	SEDANG
		2	7.705	Sedang	8.027	Sedang	58.399	SEDANG
14	S. PEPE ATAS HULU-BANYUANYAR	1	3.557	Ringan	3.630	Ringan	68.818	SEDANG
		2	2.913	Ringan	1.921	Ringan	62.158	SEDANG
15	S. PEPE ATAS TENGAH (JEMB. KOMPLANG)	1	3.553	Ringan	3.572	Ringan	71.558	CUKUP BAIK
		2	2.727	Ringan	1.614	Ringan	64.481	SEDANG
16	S. PEPE ATAS HILIR (JL. POPDA)	1	3.359	Ringan	3.368	Ringan	70.650	CUKUP BAIK
		2	2.283	Ringan	1.685	Ringan	62.185	SEDANG
17	S. PEPE BAWAH HULU (GIILINGAN)	1	6.987	Sedang	5.953	Sedang	45.002	MARGINAL
		2	11.821	Berat	12.814	Berat	35.508	MARGINAL
18	S. PEPE BAWAH TENGAH (KEPRABON)	1	5.447	Sedang	5.921	Sedang	45.519	MARGINAL
		2	11.646	Berat	12.287	Berat	42.462	MARGINAL
19	S. PEPE BAWAH HILIR (SANGKRAH)	1	5.414	Sedang	5.974	Sedang	45.435	MARGINAL
		2	11.358	Berat	12.072	Berat	39.601	MARGINAL
20	S. BROJO HULU (PAJANG)	1	5.636	Sedang	4.992	Ringan	61.393	SEDANG
		2	10.065	Berat	10.442	Berat	57.767	SEDANG
21	S. BROJO HILIR (LAWEYAN)	1	5.061	Sedang	5.016	Sedang	55.073	SEDANG
		2	6.014	Sedang	6.276	Sedang	63.637	SEDANG

IKA Existing				
Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
Memenu	0	70	0	0
Ringan	20	50	0.4762	23.8095
Sedang	12	30	0.2857	8.5714
Berat	10	10	0.2381	2.3810
IKA Existing				34.76190
Avg IKA-NSF				59.400

Lokasi Pembuatan Sumur Resapan Dangkal

Tahun 2019

No	Penerima	Alamat	Jumlah yang diterima
1	MTsN 1	Jl. MT. Haryono 24 D	1
2	SDN Kedunglumbu	Jl. Untung Suropati 127 Pasar Kliwon	1
3	SDN Mojosongo III	Jl. Jayawijaya 1 Mojosongo, Jebres	1
4	Kecamatan Jebres	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27 Jebres	1
5	Kelurahan Sumber	Jl. Kahuripan No. 8 Sumber, Banjarsari	2
6	SMAN 5 Surakarta	Jl. Letjen Sutoyo No.18, Nusukan, Banjarsari,	1
7	SMAN 6 Surakarta	Jl. Mr. Sartono No.30, Nusukan, Banjarsari	1
8	SMAN 4 Surakarta	Jl. L. U. Adisucipto No. 1, Manahan, Banjarsari	1
9	SMKN 3 Surakarta	Jl. Brigjen Sudiarto No.34, Danukusuman, Serengan	1
10	SMKN 4 Surakarta	Jl. Adi Sucipto No.40, Kerten, Laweyan	1
11	SMKN 5 Surakarta	Jalan Adi Sucipto No.42, Kerten, Laweyan	1
12	SMPN 2 Surakarta	Jl. Apel No.3, Jajar, Laweyan	1
13	SMPN 15 Surakarta	Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta	1
14	SDN Madyotaman 38	Jl. Gajah Mada no. 38 Ketelan, Banjarsari	1
15	SDN Ngemplak 149	Ngemplak Rt 01/29, Mojosongo, Jebres	1
16	SDN Sibela Timur	Jl. <i>Sibela</i> Raya, Mojosongo, Kec. Jebres	1
17	MTSN 2 Surakarta	Jalan transito, pajang, laweyan	1

18	SDN Tugu 120	Jalan Transito, Pajang, Laweyan	1
19	Kelurahan Tipes	Dipotrunan RT 1/13 (Ketua KSM Suparno Partowirejo)	1
20	Kelurahan Tipes	Dipotrunan RT 1/13	1
21	Kelurahan Kadipiro	Lemah Abang RT 02 / 21 (Ketua KSM Wagiman)	1
22	Kelurahan Kadipiro	Lemah Abang RT 02 / 21	1
23	Kelurahan Sewu	Kampung Sewu RT 02/07 (Ketua KSM Ishak Anton)	1
24	Kelurahan Sewu	Kampung Sewu RT 02/07 (Ketua KSM Sutiman)	1
25	Kelurahan Mojosongo	Ngemplak RT 1/29 (Ketua KSM Wahyu Basuki)	1
26	Kelurahan Mojosongo	Perum Puncak Solo RT 4/29 (Ketua KSM Irfa Uddin)	1
27	Kelurahan Jebres	Punggungrejo RT 02/23 Jebres (Ketua KSM Sutrisno)	1
28	Kelurahan Jebres	Punggungrejo RT 02/23 Jebres	1
29	Kecamatan Pasar Kliwon	Jl. Kapten Mulyadi No.110, Kedung Lumbu, Ps. Kliwon	1
		TOTAL	31